

***LOCAL STRONGMEN* PEMENANGAN PETAHANA
PADA PEMILIHAN BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020**

(Tesis)

Oleh

**ARDI YANTO
NPM 1926021006**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

***LOCAL STRONGMEN* PEMENANGAN PETAHANA PADA PEMILIHAN BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020**

Oleh

Ardi Yanto

Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 memunculkan adanya keterlibatan orang kuat lokal atau disebut *local strongmen*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran *local strongmen* dalam pemanfaatan kapital budaya/kultural, kapital simbolik, kapital sosial, kapital ekonomi dan kapital politik untuk pemenangan petahana pada Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Informan dalam penelitian ini diantaranya ketua tim pemenangan calon petahana, wakil bupati petahana, Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), ketua tim Pemenangan pasangan Aria Lukita Budiwan-Erlina, ketua tim pemenangan pasangan Pieter-Fakhrurrazi, Akademisi, Bawaslu Pesisir Barat, Khoirus Sobri, Mawardi dan masyarakat yang memilih petahana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putrawan Jayaningrat yang merupakan Ketua MPAL Pesisir Barat sebagai *local strongmen* mempunyai peran dalam memanfaatkan modal kapital yang dimiliki diantaranya kapital budaya/kultural ditunjukkan dengan menjalin komunikasi melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kapital simbolik ditunjukkan dengan menghimpun dukungan serta mendorong ketokohan Agus Istiqlal-A. Zulqoini Syarif. Kapital sosial ditunjukkan dengan memanfaatkan kedekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kapital politik ditunjukkan dengan mampu menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat, petahana, elit partai dan pengusaha, sementara itu pada aspek modal kapital ekonomi kurang bisa dimanfaatkan karena kurangnya sumberdaya ekonomi yang ada.

Kata Kunci: *Local Strongmen*, Petahana, Pemilihan Bupati

ABSTRACT

LOCAL STRONGMEN WINNING THE INCUMBENT IN THE 2020 WEST COAST REGENT ELECTION

By
Ardi Yanto

The election of west coast regent lead the involves of local strongmen. The purpose of this research is to find out how the role of local strongmen. in utilising cultural capital, symbolic capital, social capital, economic capital and political capital to win the incumbent in the 2020 West Coast Regent Election. This research uses descriptive qualitative research methods. The data collection technique used interviews and documentation and then analysed through data condensation, data presentation and decision making. The informants in this study included the head of the winning team of the incumbent candidate, the incumbent deputy regent, the head of the Lampung Customary Balancing Council (MPAL), the head of the winning team of the Aria Lukita Budiwan-Erlina pair, the head of the winning team of the Pieter-Fakhrurrazi pair, academics, Bawaslu Pesisir Barat, Khoirus Sobri, Mawardi and the people who voted for the incumbent. The results showed that Putrawan Jayaningrat, who is the Chairman of MPAL Pesisir Barat as a local strongmen, has a role in utilising the capital owned, including cultural / cultural capital shown by establishing communication through meetings with community leaders, symbolic capital shown by gathering support and encouraging the character of Agus Istiqlal-A. Zulqoini Syarif. Social capital is shown by utilising proximity to community leaders and political capital is shown by being able to establish relationships with community leaders, incumbents, party elites and entrepreneurs, while in the aspect of economic capital it cannot be utilised due to the lack of existing economic resources.

Keywords: Local Strongmen, Incumbent, Regent Election

***LOCAL STRONGMEN* PEMENANGAN PETAHANA
PADA PEMILIHAN BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020**

Oleh :

ARDI YANTO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **LOCAL STRONGMEN PEMENANGAN
PETAHANA PADA PEMILIHAN BUPATI
PESISIR BARAT TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa : **Ardi Yanto**

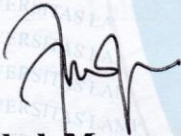
Nomor Pokok Mahasiswa : **1926021006**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

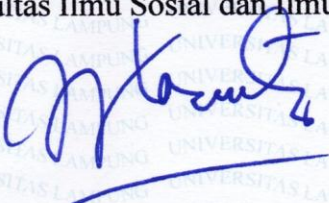


Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 196004161986032002



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.
NIP. 197804302005011002

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

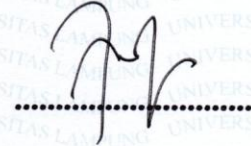


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198601 1 006

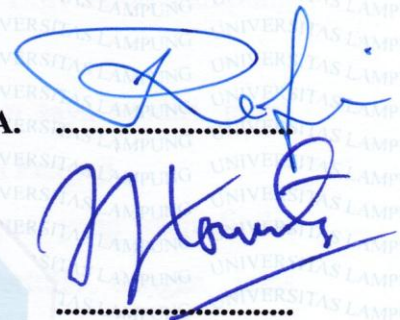
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



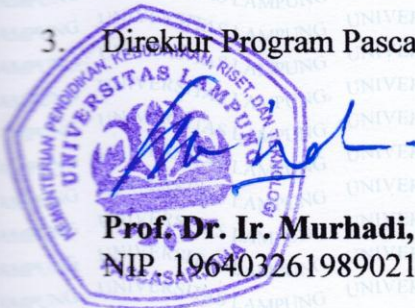
Penguji : **Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 1987032 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **13 April 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023



Ardi Yanto
NPM. 1926021006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ardi Yanto dilahirkan di Krui, pada 17 Desember 1996. Penulis merupakan anak Pertama dari Bapak Murtijan dan Ibu Rohayi Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001- 2007 di SD Negeri 1 Marang Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2003-2009, Kemudian Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pesisir Selatan tahun 2007-2010.

Setelah itu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pesisir Selatan tahun 2010-2013. Selanjutnya penulis lulus dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tahun 2017.

Selama masa perkuliahan di S-1 Ilmu Pemerintahan penulis berhimpun dalam beberapa organisasi. Penulis menjadi Kepala Biro Hubungan Luar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2014-2015. Selain itu, penulis tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Lampung. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan S-2 pada tahun 2019 yaitu sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

MOTTO

“Berdo’a Tanpa Beramal Sama Halnya Seperti Pemanah Tanpa Busur”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Cara Terbaik Untuk Memprediksi Masa Depan Adalah
Menciptakannya”

(Peter Drucker)

Mulailah Dari Diri Sendiri, Mulailah Dari Yang Terkecil, dan
Mulailah Dari Sekarang Juga.

(Ardi Yanto)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Tesis ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta
serta Istri dan Anakku yang kusayangi sebagai tanda bakti, hormat dancintaku.
Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul “Local Strongmen Pemenangan Petahana Pada Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020” sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Murtijan, dan Ibu Rohayi atas segala doa yang tucurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan ketentraman, serta balasan atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Istriku yaitu Aryani Diningrum atas dukungan serta motivasi yang diberikan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, Kesehatan.

Selanjutnya , terima kasih atas hadirnya malaikat kecil Ayah yang sudah lahir dan menjadi anak Ayah dan Bunda, yaitu, Muhammad Arelo Kai Corardi, semoga menjadi anak yang Soleh jadi kebanggaan Ayah dan Bunda, dan semua orang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas, terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku Pembimbing kedua. Terimakasih atas kritik, saran, motivasi dan bimbingan sehingga tesis ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Semoga budi baik bapak menjadiamalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.

7. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup serta pengetahuan yang diberikan semasa perkuliahan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
8. Semua teman-teman seperjuangan di pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 baik dari konsentrasi Polotda, MP dan TKP terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa bertemu kalian semua.
9. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023

Ardi Yanto

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 <i>Local Strongmen</i>	9
2.2 Modalitas Politik.....	19
2.3 Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	24
2.4 Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Sumber Data.....	39
3.5 Informan Penelitian.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.8 Teknik Uji Keabsahan Data	43

IV. PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

TAHUN 2020

4.1 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	44
-------------------------------------------------------------------------------------	----

4.2 Kekuatan Politik yang Mendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Agus Istiqlal - A Zulqoini Syarif.....	45
4.3 Kekuatan Politik Agus Istiqlal – A. Zulqoini Syarif Sebagai Calon Petahana.....	50

V. PERAN *LOCAL STRONGMEN* PEMENANGAN PETAHANA PADA PEMILIHAN BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

5.1.1 Peran <i>Local Strongmen</i> dalam pemanfaatan Kapital Ekonomi.....	60
5.1.2 Peran <i>Local Strongmen</i> dalam pemanfaatan Kapital Budaya/Kultural	69
5.1.3 Peran <i>Local Strongmen</i> dalam pemanfaatan Kapital Simbolik.....	76
5.1.4 Peran <i>Local Strongmen</i> dalam pemanfaatan Kapital Sosial.....	85
5.1.5 Peran <i>Local Strongmen</i> dalam pemanfaatan Kapital Politik.....	93

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	111
6.2 Saran	113

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indikator utama dalam demokrasi adalah suksesi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bebas dan jujur. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik dari semua sistem pemerintahan yang dianggap buruk. Namun, dalam praktiknya demokrasi tidak serta merta membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Pada aspek ini sistem demokrasi dianggap baik karena dalam pelaksanaan memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemerintahan melalui pilkada secara periodik atau secara berkala (Mar'iyah, 2019:12).

Melalui pilkada rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tetapi juga program yang dikehendaki sebagai kebijakan pemerintah daerah pada pemerintahan selanjutnya (Gaffar, 2017:51). Pilkada sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 bahwa pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ataupun Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Begitu penting tradisi pilkada di Indonesia sehingga orang menyamakannya dengan sebutan pesta demokrasi, sebuah pesta yang dirayakan setiap lima tahun sekali. Padahal bukannya pesta demokrasi yang dimaksud, melainkan sebagai salah satu bentuk pesta yang riuh untuk memperebutkan suara pemilih, karena kebanyakan yang terjadi dalam pilkada para kandidat atau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya memperebutkan dan merayu pemilih untuk memilihnya, Oleh karena itu pilkada seringkali dimaknai sebagai upaya untuk merebut hati rakyat sehingga berbagai upaya apapun digunakan untuk mendapat dukungan suara sebanyak-banyaknya.

Hal ini tidak terlepas dari kehadiran orang kuat lokal dalam pilkada bahkan tidak hanya dalam pilkada orang kuat lokal hadir juga dalam pemilihan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana hampir marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam pilkada yang dilaksanakan secara langsung telah membuka kran baru bagi seluruh lapisan masyarakat ditingkat lokal untuk ikut berkompetisi. Ironisnya ketika pilkada berlangsung yang bebas diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat hanya dilihat sebagai bentuk dari pemenuhan dan tuntutan regulasi, dimana prosedur-prosedur demokrasi menjadi lebih penting dibandingkan dengan substansi itu sendiri, maka dapat sangat terbuka kemungkinan pilkada yang diwarnai oleh kompetisi antar calon hanya dijadikan alat tawar menawar atas kepentingan semata. Aspek tersebut dilakukan untuk meraih dukungan secara instan melalui pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki oleh orang kuat lokal, (Siregar, 2016:20).

Orang kuat lokal atau lebih dikenal dengan *local strongmen* secara konsep didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha atau bos, kepala suku, petani kaya, pemimpin klan atau tokoh agama dan sebagainya yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerja sama jejaring yang mereka bangun (Hutabarat, 2021:2017). Selain itu *local strongmen* atau yang biasa dikenal dengan sebutan orang kuat lokal juga merupakan tokoh yang

identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya, (Kaldun, 2017:26).

Jika dikaitkan dengan pilkada maka orang kuat lokal memiliki banyak pengaruh dan apabila mampu dimanfaatkan dengan maksimal maka akan berdampak pada perolehan kemenangan, hal itu dikarenakan orang kuat lokal bisa mempengaruhi masyarakat serta bisa memenangkan kontestasi dalam pilkada. Pemanfaatan orang kuat lokal (*local strongmen*) biasanya digunakan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana, (Amrianto, 2018:4).

Pemanfaatan orang kuat lokal (*local strongmen*) oleh petahana juga terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat periode 2020-2024. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat periode 2020-2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan yaitu pasangan Pieter–Fahrurozzi, Aria Lukita Budiwan – Erlina, dan pasangan Agus Istiqlal–Zulqoini Syarif, Jika melihat tiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat periode 2020-2024 Agus Istiqlal merupakan calon bupati petahana.

Agus Istiqlal merupakan calon bupati petahana yang didukung orang kuat lokal (*local strongmen*) yaitu tokoh adat Sai Batin yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Pesisir Barat yang terdiri dari 16 Marga, (Prabawa, 2018:42). Adanya dukungan dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) yang merupakan orang kuat lokal (*local strongmen*) membuat calon Petahana dijadikan pilihan utama masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan semakin kuat. Mengingat selama ini Sai Batin merupakan tokoh yang sangat disegani dan dihormati dalam masyarakat adat dimana secara politis mampu menjadi kekuatan politik yang saat ini dianggap efektif untuk memenangkan kontestasi politik khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, (Prabawa, 2018:47).

Kuatnya dukungan dari tokoh-tokoh adat Sai Batin juga terlihat dari perolehan suara calon petahana yang lebih dominan dibandingkan calon non-petahana. Berikut ini adalah data hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Periode 2020-2024.

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020

Wilayah	Pieter - H. Fahrurrazi, S.P., M.M	Aria Lukita Budiwan, ST - Erlina, SP., MH	DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H - A Zulqoini Syarif, S.H
Pesisir Tengah	779	6.123	3.681
Pesisir Selatan	2.209	5.820	6.474
Lemong	1.173	2.893	3.216
Pesisir Utara	486	2.399	1.683
Karya Penggawa	353	4.342	4.300
Pulau Pisang	38	518	312
Way Krui	226	1.519	3.436
Krui Selatan	279	3.191	2.186
Ngambur	2.035	4.080	5.554
Ngaras	1.119	1.438	2.564
Bengkunat	3.683	3.030	7.931
Jumlah	12.383	35.353	41.317
Persentase	13.9%	39.7%	46.4%

Sumber: KPU Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan data pada tabel diatas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat petahana yaitu Agus Istiqlal-A Zulqoini Syarif menguasai enam wilayah yaitu Pesisir Selatan, Lemong, Way Krui, Ngambur, Ngaras dan Bengkunat dengan perolehan suara sebesar 41.317 atau 46.4%, sisanya yaitu Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pulau Pisang dan Krui Selatan dikuasai oleh pasangan Aria Lukita Budiwan-Erlina, dengan mendapatkan suara sebanyak 35.353 atau 39.7%, diketahui bahwa Erlina juga merupakan wakil bupati petahana. Terakhir adalah pasangan Pieter-Fahrurrazi yang hanya mendapatkan suara sebanyak 12.383 atau 13.9%.

Kemenangan petahana dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat salah satunya diindikasikan dari kuatnya dukungan dari orang kuat lokal (*local strongmen*) yang dalam hal ini adalah dukungan

dari tokoh-tokoh adat Sai Batin yang menyatakan dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Agus Istiqlal-A. Zulqoini Syarif yang merupakan calon petahana. Pernyataan dukungan orang kuat lokal (*local strongmen*) pada pasangan ini dilakukan secara terang-terangan yang disampaikan melalui media maupun secara langsung kepada masyarakat. Dukungan itupun berasal dari berbagai orang kuat lokal (*local strongmen*) yang rata-rata berasal dari tokoh adat.

Kemenangan petahana Agus Istiqlal-A.Zulqoini Syarif yang didukung dengan orang kuat lokal (*local strongmen*) juga dikuatkan dari hasil observasi pra penelitian yang peneliti lakukan di wilayah Kecamatan Way Krui, Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Bengkunt di tiga kecamatan tersebut pasangan Agus Istiqlal-A.Zulqoini Syarif memperoleh suara terbanyak dan cukup dominan hal itu dikarenakan tiga kecamatan tersebut rata-rata etnis Lampung Sai Batin, misalnya saja di Kecamatan Bangkunt pasangan Agus Istiqlal-A.Zulqoini Syarif mendapatkan suara 7.931 setelah dilakukan pemetaan suara ada sebanyak 4.931 suara berasal dari etnis Lampung Sai Batin sedang sisanya kurang lebih 3.000 suara berasal dari etnis pendatang yaitu Jawa, Sunda, Batak, Padang dan etnis pendatang lainnya begitu juga yang terjadi di Kecamatan Way Krui dan Kecamatan Ngambur.

Hasil pra penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa keterlibatan tokoh adat Sai Batin dalam mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dalam upaya pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana di Pilkada Pesisir Barat tahun 2020 sangat tertihat, yang ditunjukan dari tingginya partisipasi pemilih dari etnis Lampung Sai Batin yang mencapai 41% dari total partisipasi pemilih Pilkada Pesisir Barat Tahun 2020 sebesar 82.99%. Hal tersebut menunjukan tokoh adat Sai Batin memiliki peran sentral atas kemenangan pasangan Agus Istiqlal-A. Zulqoini Syarif. Selain itu juga Agus Istiqlal yang merupakan sosok petahana juga sukses mengatur sinergitas *local strongmen* sehingga berhasil mendapatkan suara sebesar 46.4%.

Berdasarkan fenomena diatas maka menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengingat masyarakat menentukan suaranya bukan berdasarkan kompetensi dan kinerja calon petahana melainkan adanya hubungan patron-klien, dimana terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana dalam Pilkada Pesisir Barat yang memiliki akses terhadap kebijakan didaerah juga memerlukan dukungan dari masyarakat yang dalam hal ini adalah massa yang berasal dari adat Sai Batin.

Untuk memperkuat hasil penelitian yang peneliti lakukan penulis menambahkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Penelitian tentang strategi orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 (studi pada kemenangan calon legislatif daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka), yang dilakukan oleh Resti Aprilia, Rini Archda Saputri dan Luna Febriani (2020), penelitian ini dilakukan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bangka, dalam penelitian yang dilakukan oleh Resti Aprilia orang kuat lokal dilihat dari kemampuan dalam melakukan segmentasi, kemampuan dalam mencapai target dan kemampuan dalam melakukan mobilisasi massa
2. Penelitian tentang *sinergi local strongmen*: pengusaha dan tokoh agama dalam pemilihan legislatif tahun 2014, penelitian ini dilakukan oleh Khoirul Minan (2014), penelitian ini dilakukan pada Pemihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Demak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Minan menggunakan aspek pada teori fungsional struktural
3. Penelitian tentang bangsawan dan politik lokal dengan studi kasus pada kontestasi Andi Pada Pilkada Kabupaten Pinrang, penelitian ini dilakukan oleh Fitriani Sari (2018), penelitian ini dilakukan pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pinrang, pada penelitian yang dilakukan Fitriani Sari aspek yang digunakan adalah perilaku kandidat, kehadiran modal politik serta habitus dan modal
4. Penelitian tentang orang kuat lokal di Indonesia era desentralisasi dengan studi kasus pada dinamika kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi, penelitian

ini dilaksanakan Melvin Perjuangan Hutabarat (2021), dimana peneliian dilakukan di Provinsi Jambi pada tahun 2021, dalam penelitian yang dilakukan oleh Melvin Perjuangan Hutabarat menggunakan aspek kontrol sosial, modal simbolik, modal ekonomi, dan modal sosial

5. Penelitian tentang Fenomena “*Bosisme Local*” di Era Desentralisasi: Studi Hagemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara, yang dilakukan oleh Eka Suaib dan La Husen Zuada (2016), dimana penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2016, dengan menggunakan aspek politik dan ekonomi sebagai modal politik.

Jika melihat hasil-hasil penelitian, terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini akan melihat peran *local strongmen* oleh tokoh adat Sai Batin dari aspek kekuatan *local strongmen* dengan menjadikan aspek kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik, kapital sosial dan kapital politik sebagai tolak ukur kekuatan *local strongmen* dalam memenangkan petahana pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Keempat aspek tersebut dijadikan untuk melihat *local strongmen* dalam Pemenangan Petahana dalam Bupati di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran *local strongmen* dalam memanfaatkan kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik, kapital sosial dan kapital politik dalam pemenangan petahana pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran *local strongmen* dalam memanfaatkan kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik, kapital sosial dan kapital politik untuk pemenangan petahana pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan tentang pemanfaatan kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik, kapital sosial dan kapital politik yang timbul dari peran *local strongmen* dalam pemenangan petahana pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat terhadap elit/politisi sebagai acuan dalam melihat pelaksanaan pilkada dan keberadaan elit, *local strongmen* dalam mencapai tujuan, menempatkan diri dalam masyarakat, membangun relasi yang baik serta mengkonversikan modal yang dimiliki sehingga dapat memberikan pengaruh dalam kontestasi politik yang akan diikuti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Local Strongmen*

Orang kuat lokal atau lebih dikenal dengan *local strongmen* secara konsep didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha atau bos, kepala suku, petani kaya, pemimpin klan atau tokoh agama dan sebagainya yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerja sama jejaring yang mereka bangun (Hutabarat, 2021:2017). Selain itu *local strongmen* atau yang biasa dikenal dengan sebutan orang kuat lokal juga merupakan tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya, (Kaldun, 2017:26).

Perubahan sosial politik yang terjadi dan merubah warna masyarakat dunia pada saat ini, dinilai sebagai dampak pergerakan negara-negara di dunia dan masyarakat dimasa lalu atau dalam terminologi Marx, dikenal dengan diskursus *materialisme historis*. Dimana globalisasi, kolonialisasi dan industrialisasi melahirkan pengaruhnya yang begitu primer. Perubahan yang terjadi atas negara dan masyarakat di dunia hingga memunculkan dualisme potret antara negara kuat dan negara lemah bukanlah disebabkan karena macam-macam jenis pemerintahan yang dianut, tetapi lebih pada efektifitas kinerja sebuah pemerintahan itu berjalan.

Negara, dalam masa tertentu, pernah menjadi simbol tunggal dalam dinamika kehidupan masyarakat karena kapabilitas dan koersinya yang begitu besar. Segala garis kebijakan tersentralisasi pada wujud negara sebagai satu-satunya

pemilik kekuatan otonom. Negara menjadi pusat kuasa yang tak terbendung. Pengalaman ini dapat kita lihat semasa perang dunia I, II, perang dingin, dimasa kolonialisme global, dan sewaktu gelombang industrialisasi mendera dunia modern. Sedangkan pasca itu, semua kritik, peran sentral dan pengaruh negara lama-lama ditinggalkan oleh para pengkaji/ilmuwan sosial-politik, (Migdal 2009:59).

Pasca kolonialisasi berakhir, kita pun disuguhkan dengan fenomena-fenomena baru daripada dasawarsa sebelumnya, yakni munculnya organisasi-organisasi non formal diluar negara pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas negara sebagai satu-satunya alat pengontrol yang sah. Etnisitas, klan, bahkan kelompok-kelompok macam sekte agama adalah macam-macam kekuatan yang bisa saja mengganggu bahkan menghalang-halangi jalannya berbagai aturan serta rambu-rambu pembangunan yang telah ditetapkan oleh negara.

Pada negara-negara yang baru merdeka, modernisasi aturan hukum bisa jadi masih sering bertolak belakang dengan aturan-aturan tradisional yang secara kultur masih kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperparah lagi dengan kompetisi antar kelompok kepentingan diantara mereka untuk merebut kekuasaan yang diwariskan pasca bangsa penjajah hengkang. Adanya kelompok ataupun institusi informal diluar negara yang mengurangi efektifitas dan kapabilitas Negara hal itu disebabkan oleh kehadiran *local strongmen*/orang kuat lokal, (Migdal 2009:62).

Dalam dinamika politik lokal di Indonesia, eksistensi orang kuat lokal bisa ditelusuri lewat beragam kultur dan budaya setempat. Penisbatan *local strongmen* masing-masing wilayah mempunyai istilah yang beragam, di Banten misalnya, manifestasi *local strongmen* digambarkan melalui julukan *Jawara*. Sedang istilah orang kuat lokal di Madura dikenal dengan sebutan *Blater*. Keberadaan dan posisi mereka, bila dilihat dari aspek sejarah, merupakan aktor yang tumbuh dan berkembang didalam adat dan budaya masyarakat sejak era pra kolonial dan masa kolonial. Mereka lahir dengan

berbagai pengalaman kekerasan disekeliling mereka. Sikap, tindakan, serta cara pandang yang berlaku di masyarakat merupakan benih internalisasi budaya kekerasan yang melekat dalam diri orang kuat lokal. Bahkan rupa mereka dimasa lalu tak jarang adalah para pemberontak, pembela rakyat, penolong kaum papa yang dengan kekuatan serta keberanian yang dimiliki, bersama-sama melakukan perlawanan terhadap kesemena-menaan para elit, baik elit penjajah maupun elit feodal lokal. Cerita rakyat ini turun temurun diwariskan dalam beberapa kisah heroik semisal Ken Arok, Samin, dan Pitung, (Halim, 2014:60).

Menurut Agustino dan Yusoff (2010:12-13), menjelaskan bahwa politik lokal di Indonesia dikaji bukan hanya dari aspek struktur (*alisme*) semata (seperti otonomi dan *good governance*, manajemen dan pelayanan publik, dan lainnya yang bersifat struktural), tetapi juga harus dipahami dan dilihat dari aspek agensi atas menunjukkan tendensi menguatnya *local strongmen* pasca demokratisasi. Fenomena *Bosism* di kawasan Asia, menurut penelitian Agustino dan Yusoff merefleksikan apa yang disebut sebagai *local strongmen* dibandingkan dengan *strong society*. Agustino dan Yusoff melihat *bosisme* menunjukkan peran *local strongmen* sebagai *predatory* broker politik yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan *koersif* (tekanan) dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka. Dari penelitiannya, menemukan bahwa *Bosisme* beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman.

Berkembangnya *bossism* lokal dalam pandangan Agustino dan Yusoff telah menunjukkan ketiadaan salah satu nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai dengan penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu *political equality*. Konsep ini menyangkut tiga macam hubungan yaitu antar pemerintah (*intergovernmental relation*), antara negara dan masyarakat (*state society relation*) dan antara masyarakat dan masyarakat (*society-society relation*), (Agustino dan Yusoff, 2010:13)

Mengkaitkan fenomena *bossism* dengan praktik desentralisasi di negara-negara demokrasi, juga menjadi salah satu penelitian Agustino dan Yusoff. Bagi Agustino dan Yusoff, desentralisasi dan *good governance* yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dan lembaga donor bukanlah tanpa resiko, kenyataan menunjukkan bahwa dengan terdapatnya devolusi kekuasaan ke daerah, maka desentralisasi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi tidak terhindarkan. Ditegaskan Agustino dan Yusoff, bahwa penerapan desentralisasi, sebagaimana yang telah banyak diprediksi sebelumnya, telah melahirkan berbagai kekuatan predator lokal yang berusaha untuk membajak desentralisasi dengan politik uang, kekerasan dan pemaksaan melalui premanisme politik. Mereka adalah aktor yang terinkubasi oleh rezim represif orde baru, ketika keterbukaan politik melalui cara-cara demokratis telah tersedia, kelompok ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan aturan main yang berlaku, (Agustino dan Yusoff, 2010:14).

Berdasarkan penjelasan diatas maka eksistensi *local strongmen* di daerah muncul karena imbas dari pola adat yang sudah mengakar dalam kultur dimasyarakat dan yang tidak kalah penting, keberadaan *local strongmen* merupakan kiamat bagi jalannya efektifitas dan dominasi negara atas masyarakat, sebab negara otomatis menjadi lemah dan gagal untuk melakukan kontrol atau dengan bahasa yang lebih halus, akan sulit untuk melakukan berbagai perubahan melalui program serta kebijakan yang tengah dicanangkan, (Halim, 2014:62).

Menurut Migdal (2009:68-69), faktor munculnya *local strongmen* adalah sebaga berikut:

1. *Local strongmen* tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jaringan. Berkat struktur yang mirip jaringan inilah, para orang kual lokal mendapatkan pengaruh signifikan yang jauh melebihi pengaruh para pemimpin dan para birokrat lokal formal.
2. *Local strongmen* melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai strategi bertahan hidup. Logika bertahan hidup, memberikan kesempatan bagi *local*

strongmen bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Personalisme *local strongmen* menempatkan mereka sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya yang kekurangan di daerah kekuasaan mereka

3. *Local strongman* secara langsung ataupun tidak langsung telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparaturnya sehingga menyebabkan pemerintah lemah.

Ketiga aspek tersebut maka *local strongmen* yang ada di daerah sangat identik dengan orang yang memiliki kelebihan dan pengaruh signifikan jauh melampaui para pemimpin negara dan para birokrat lokal. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Sehingga Migdal (2009:70) menggambarkan pemimpin negara atau birokrat lokal sebagai personalisme, klientilisme dan hubungan patron klien serta orang kuat lokal digambarkan sebagai penempatan peran *patron* yang memberi kebaikan personal bagi *klien* yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka. Sehingga *local strongmen* juga memiliki kemampuan menguasai lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Iman (2014:11), menjelaskan bahwa *local strongmen* adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya, *local strongmen* merupakan sebuah terminologi yang identik dengan elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa. Begitupun dengan *local*

strongmen. Selain itu, Nurhasim (2013:13) menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok seperti kelompok keagamaan, kelompok profesi, ekonomi (perusahaan), budaya, politik (partai politik) dan lain sebagainya. Pada setiap kelompok tersebut terdapat segelintir orang yang lebih cakap dan memiliki pengaruh daripada lainnya, mereka itulah yang disebut orang kuat lokal atau *local strongmen*.

Kemunculan *local strongmen* sebagai salah satu sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan pimpinannya sebagai tuan tanah atau orang kaya. Dari sisi tersebut *local strongmen* kadang dipandang sebagai bos ekonomi, *local strongmen* memiliki kecenderungan mereka untuk menjadi investor politik Pilkada pada akhirnya dapat mempengaruhi proses desentralisasi yang sejati dilevel local, (Iman, 2014:12).

Menurut Agustino (2018:221) menjelaskan bahwa *local strongmen* berhasil melakukan kontrol sosial. Mengenai fenomena orang kuat lokal tersebut, Migdal (dalam Harris, 2017:27), yang menjelaskan bahwa terdapat tiga argumentasi yang saling berkaitan tentang *local strongmen* yaitu:

1. Orang kuat lokal tumbuh subur didalam masyarakat “mirip jaringan” yang digambarkan sebagai “sekumpulan campuran organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri” dengan “kontrol sosial” yang efektif “terpecah-pecah” Pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, acapkali diakui melebur dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya didalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar. Berkat struktur masyarakat mirip jaringan, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan migdal sebagai “segitiga penyesuaian
2. Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan “strategi bertahan hidup” penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan diantara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Migdal cenderung membingkai diskusi

mereka dengan istilah “personalisme”, klientilisme, dan “hubungan patron klien” serta melukis orang kuat lokal sebagai penempatan peran patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka.

3. Berhasilnya orang kuat lokal menguasai lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan.

Terjadinya *local strongmen* di daerah dikarenakan seseorang tersebut memiliki modal yang cukup kuat dari semua sektor mulai dari ekonomi, budaya atau kultural, keturunan atau kapital simbolik, dan kapital sosial, menurut Boudieu (2018:115), modal adalah akumulasi kerja yang memerlukan waktu untuk diakumulasikan. Untuk itu tidak cukup hanya memiliki satu modal saja dalam mendapatkan kepentingan, dibutuhkan adanya modal lain untuk saling melengkapi serta waktu dalam mereproduksi modal-modal tersebut menjadi alat kuasa.

Modal dipandang Bourdieu (2018:118) sebagai basis dominasi, beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimasi. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang *legitimate*. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan versi dunia sosial yang resmi. Bagi Bourdieu, (2018:122) modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang-baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah informasi sosial tertentu.

Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh. Pada pertarungan/kompetisi setiap aktor/elit, modal (kapital) berperan penting dalam mempertahankan eksistensi aktor/elit dan bahkan memberikan kesempatan dalam merebut kemenangan atau mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Bourdieu (2018:126-136) terdapat empat tipe modal (*capital*) yakni yang biasa digunakan untuk memaksimalkan *local strongmen*, diantaranya:

1. Kapital ekonomi

Kapital ekonomi dimana seseorang harus memiliki harta benda, uang, kepemilikan dan sebagainya. Kapital ekonomi ini sangat mudah dikonversi menjadi kapital-kapital lainnya tergantung sang agen memanfaatkan modal ini dalam arena tertentu karena kapital ini merupakan sumber penghasilan atau finansial. Kehadiran kapital ini merupakan basis Marx mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas. Dimana menurut Marx posisi sosial masyarakat mengacu pada posisi produksi ekonomi. Bourdieu kemudian menambah kapital lainnya dalam mengkategorisasi masyarakat.

2. Kapital budaya/kultural

Kapital budaya/kultural terdiri dari bagaimana seseorang memanfaatkan informasi mengenai bentuk-bentuk kebudayaan, pengetahuan, memiliki strata pendidikan dan keterampilan. Wujud dari kapital budaya ini adalah berupa ijazah atas pendidikan yang ditempuh, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh, kemampuan menulis, serta gaya berbicara serta cara bergaul dengan lingkungan sosial dan pembawaannya dapat diperhitungkan dalam menentukan kedudukannya di lingkungan sosial.

Adapun menurut Bourdieu (dalam Sary, 2018:21) terdapat tiga bentuk kapital budaya antara lain:

- a. Terintegrasi ke dalam diri, berarti pengetahuan yang diperoleh selama proses studi dan yang disampaikan melalui lingkungan sosialnya

kemudian membentuk disposisi yang tahan lama (hasil kerja pribadi dan akuisisi tanpa harus disadari)

- b. Obyektif, berarti seluruh kekayaan budaya (buku dan karya seni) bisa dimiliki secara material (mengandaikan kapital ekonomi) dalam perbedaan dengan pemilikan simbolis (yang mengandaikan kapital budaya)
- c. Terinstitusionalisir, yakni ketika gelar pendidikan yang disahkan oleh suatu institusi, menjadi anggota asosiasi ilmuwan prestisius dan anggota tim peneliti suatu lembaga.

3. Kapital simbolik

Kapital simbolik ini berasal dari kehormatan yang didapatkan dari garis keturunan misalnya para darah biru atau bangsawan, modal simbolik ini mendapatkan tempat dan perhatian khusus di masyarakat sekitar karena memiliki perbedaan dari masyarakat lainnya. Namun meski kapital ini dapat diwariskan tetap butuh adanya legitimasi dari masyarakat untuk menghasilkan kekuasaan simbolik. Kapital yang dapat diwariskan ini merupakan kuasa genetis yang secara otomatis diperoleh, namun adapula kapital simbolik yang diperoleh berdasarkan hasil konversi dari kapital lainnya, (Sary, 2018:18).

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

4. Kapital sosial

Kapital sosial dapat dilihat bagaimana para aktor/elit ini membangun relasi-relasi dengan masyarakat tanpa ada sekat yang tentunya dapat dinilai orang sekitarnya serta mendapatkan penghargaan tertentu karena dapat membangun relasi sosial dengan baik. Menurut Bourdieu (2018:130) empat tipe kapital sosial:

- a. Kemampuan kerja sama, budaya kerja sama melahirkan kepercayaan
- b. Mengandaikan pengakuan timbal balik (tidak hanya instrumental) potensi
- c. Fenomena struktural (interiorisasi nilai, pertukaran, solidaritas, kepercayaan berkat adanya sanksi/imbalan, pengawasan diri)
- d. Tidak hanya kepercayaan tetapi juga bentuk dan struktur.

Modal sosial termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal sosial atau jaringan sosial ini dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa, (Sary, 2018:19).

Sedangkan modal sosial bagi Fukuyama (2020:21) adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.

Kemudian pandangan pakar dalam mendefinisikan modal sosial dibagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*). Pada diri individu manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. Individu yang berlainan memperoleh hasil yang sangat tidak setara dari modal yang kurang lebih ekuivalen (ekonomi atau budaya) menurut sejauh mana mereka mampu memobilisasi sekuat tenaga modal dari suatu kelompok (keluarga, mantan siswa sekolah elite, klub pilihan, kebangsawanan dan lain sebagainya). Masing-masing kapital bisa saling terkonversi satu sama lain, misalnya pada kapital ekonomi yang sangat mudah untuk dikonversikan menjadi kapital lainnya.

Hal dalam wujud suatu tindakan seseorang yang senantiasa memanfaatkan kapital ekonomi yang dimiliki berupa harta kekayaan untuk membantu sesama manusia atau dengan kata lain senantiasa memberi sumbangan kepada orang lain, sehingga orang kaya inipun disukai oleh lingkungannya. Tindakan ini pun memberinya kedudukan di lingkungan sosialnya, selain itu dari sikap yang ditunjukkannya pun kemudian diberi gelar oleh masyarakat yakni orang yang dermawan.

Gelar dermawan ini merupakan kapital simbolik yang telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Selain itu dengan memanfaatkan kapital ekonomi juga seseorang mampu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi yang dapat menghasilkan gelar pendidikan dari institusi yang telah mendapatkan legitimasi.

2.2 Modalitas Politik

Pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Sistem demokrasi menjelaskan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda

Jika mencermati prosedur maupun proses pemilihan dalam pilkada secara langsung, secara metafora bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil. Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pikada secara langsung manakalah memiliki tiga kombinasi dalam berkendara yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi

dalam pilkada. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial, (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh, (Marijan, 2016:89).

1. Modal politik (*political capital*)

Kandidat dalam pilkada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pilkada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang. Namun pilkada dan wakada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat.

Modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*), (Marijan, 2016:91).

Casey dalam Marijan (2016:91), mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang

menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Marijan (2016:96) politik dalam konteks lokal yaitu mereka yang memiliki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada ditingkat daerah. Elit non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elitelit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan partai politik

(koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan pilkada.

2. Modal sosial, (*social capital*)

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

James Coleman dalam Marijan (2016:98), mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.

Dari sudut pandang lain, North dan Olson dalam Marijan (2016:98) menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

3. Modal ekonomi (*economical capital*)

Modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya, (Marijan, 2016:101).

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional, (Marijan, 2016:101).

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Menurut Marijan (2016:102), mahal nya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik

- yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyetor dana sumbangan hingga miliaran rupiah
- b. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika
 - c. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Penjelasan diatas diketahui bahwa modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk pemenangan pilkada.

Berdasarkan penjelasan dua teori diatas yaitu teori menurut Bourdieu yang mengungkapkan terdapat empat tipe modal/kapital yang dapat dimanfaatkan *local strongmen* dalam kontestasi politik diantaranya, kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik dan kapital sosial serta yang diungkapkan oleh Kacung Marijan yaitu terdapat tiga modal diantaranya adalah modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Diantara teori yang diungkapkan diatas terdapat dua kesamaan modal/kapital yaitu kapital ekonomi dengan modal ekonomi, dan kapital sosial dengan modal sosial maka dari itu penulis akan mengkolaborasikan kedua teori tersebut yang diantaranya terdapat lima modal yang berbeda diantaranya kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik, kapital sosial dan kapital politik.

2.3 Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari adanya perebutan kekuasaan, oleh karena itu berbagai cara dan strategi digunakan untuk memenangkan calon kepala daerah sebagai bentuk memperoleh jabatan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu rata-rata

calon petahana memanfaatkan potensi dari orang kuat lokal (*local strongmen*). Hal itu dikarenakan calon petahana mengetahui bahwa orang kuat lokal (*local strongmen*) memiliki basis pemilih yang kuat serta bisa memfasilitasi dalam proses pendekatan dengan pemilih. Oleh karena itu peran dari orang kuat lokal (*local strongmen*) sangat penting dalam pemilihan kepala daerah.

Orang kuat lokal (*local strongmen*) tidak hanya berperan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah namun juga termasuk pada keputusan dalam mendukung dan menentukan calon kepala daerah yang akan memimpin daerah mereka. Keputusan *local strongmen* dalam menentukan dukungan terhadap calon kepala daerah cukup penting, karena hal itu menjadi referensi bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang dianggap tepat untuk meningkatkan kemajuan daerah. Oleh sebab itu *local strongmen* yang berperan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah harus memahami seperti apa figur dan kriteria calon yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin di daerah mereka.

Keterlibatan *local strongmen* pada kemenangan petahana tentunya didorong oleh berbagai macam alasan, misalnya saja karena kinerja kepala daerah petahana yang memuaskan selama menjalankan roda pemerintahan dalam waktu satu periode kepemimpinan. Selain itu perilaku kepala daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian adanya koordinasi sehingga tidak ada disharmonisasi hubungan antara petahana dengan *stakeholder*, *stakeholder* selalu dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan daerah.

Local strongmen memiliki korelasi yang cukup kuat dengan calon petahana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), hal itu dikarenakan kekuatan dari *local strongmen* sering dimanfaatkan oleh calon Petahana untuk mendulang suara mengingat keberadaannya *local strongmen* yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi masyarakat luas dikarenakan *local strongmen* memiliki nilai material, kekayaan, kekuasaan dan keberanian yang paling kuat

dikalangan masyarakat. Oleh karena itu *local strongmen* dalam memilih calon dalam pilkada sangat selektif dan cukup hati-hati.

Selain itu *local strongmen* menjatuhkan pilihan kepada calon kepala daerah petahana juga dengan pertimbangan ada hubungan kekeluargaan antara *local strongmen* dengan calon petahana, memiliki citra yang baik dimata masyarakat yang dibuktikan dari kinerja Petahana yang sangat memuaskan selama menjalankan roda pemerintahan dalam waktu satu periode kepemimpinan sehingga memungkinkan untuk memperoleh suara terbanyak dan petahana mauatau bersedia melibatkan *local strongmen* dalam proses formulasi kebijakan daerah. Berdasarkan aspek tersebut maka Petahana biasanya menjadi pilihan utama dari *local strongmen* untuk diberikan dukungan dalam pilkada.

Menurut Asfar (2016:10) menjelaskan bahwa secara harfiah petahana berasal dari bahasa latin yang bermakna “bukti”, secara sederhana bahwa petahana adalah calon kepala daerah yang telah terbukti. Penyifatan selanjutnya tergantung bagaimana selama dia menjabat sebagai Bupati, Walikota, Gubernur bahkan Presiden. Terbukti gagalkah, sukseskah atau mungkin terbukti korupsi. Pada kitab Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, kata *TAHANA* dirujuk ke kata *TAKHTA* yang berarti singgasana, kursi kerajaan, kedudukan, geta, mahkota, kekuasaan, kehormatan, persemayaman, posisi dan tahana.

Menurut Salomo Simanungkalit (dalam Gaffar, 2021:86), menjelskan bahwa *Tahana* mempunyai arti kedudukan martabat (kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya) dan kata “bertahana” yang berarti bersemayam dan duduk. Jika kita berpedoman pada pola pembentukan kata bahasa Indonesia, kata ‘pertahana’ dapat diterima. Coba dilihat analogi sebagai berikut: tinju-bertinju-petinju, tatarbertatar-petatar. Maka tahana-bertahanan-pertahana. Dari segi arti juga bisa diterima, kata ‘pertahana’ dapat kita diartikan yang sedang memegang jabatan.

Menurut Gaffar (2021:91), dalam istilah seputar pilkada, petahana sering mengacu pada orang yang telah atau sedang menjabat. Sebagai contoh dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, kata petahana artinya mereka yang menduduki jabatan bupati dan wakil bupati yang pada saat akan dilangsungkannya pilkada. Petahana disini bisa disejajarkan dengan petahana, sehingga petahana artinya sama dengan petahana

Dalam konteks pencalonan petahana dalam sebuah pilkada, tentu membutuhkan beberapa modal yang kemudian dapat menjadi satu kekuatan dalam meraup dukungan atau suara masyarakat. Modal-modal tersebut yakni modal sosial dan modal politik. Modal sosial merupakan modal yang ditetapkan oleh petahana selama menduduki jabatan. Dalam artian, bagaimana selama masa jabatannya dia membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, baik itu masalah pembangunan, pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, (Gaffar, 2021:92).

Menurut Asfar (2016:14) modal sosial ini dikumpulkan guna mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan harapan dalam pilkada mendatang petahana dapat kembali terpilih. Hubungan-hubungan yang diawali pada masa kampanye dengan program-program kerja sebagai komitmen awal, tentu akan menjadi gerbang dalam mengumpulkan modal sosial untuk pilkada selanjutnya. Kedua adalah modal politik, salah satunya yaitu penggunaan kendaraan politik yakni partai politik dalam proses pencalonan. Partai politik dianggap mampu berperan sebagai tempat pengkaderan regenerasi kepemimpinan dalam sebuah sistem politik, yang mana dianggap mampu memberikan pendidikan politik yang dapat menjadi modal bagi para calon kepala daerah.

Melalui posisinya, para petahana itu akan berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memberi kesan kepada para pemilih bahwa mereka menaruh perhatian yang besar kepada rakyat, disamping itu dimaksudkan sebagai langkah untuk memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan sebelum menjabat, orientasi kebijakan seperti itu dimaksudkan

sebagai bukti kepada para pemilih bahwa para petahana itu memang layak untuk dipilih.

Secara politik, kegagalan petahana terpilih sebagai kepala daerah kembali merupakan pertanda bahwa mereka tidak mampu membangun akuntabilitas kepada masyarakat. Kegagalan ini biasanya berkaitan dengan persepsi masyarakat bahwa kepala daerah tersebut dipandang memiliki kekurangan-kekurangan dimasa kepemimpinannya dan adanya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan. Implikasinya, kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah itu berkurang. Realitas demikian berimplikasi pada ketidakmampuan untuk melakukan akumulasi modal sosial, (Asfar, 2016:16).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa petahana, dalam dunia politik adalah pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Petahana sering digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, karena proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Melalui pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum pilkada, kepala daerah dipilih melauai sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, (2019:48), mengatakan bahwa pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi

kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom yang merupakan perintah dari perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Irtanto (2018:159) pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan landasan hukum diatas, pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas, karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media massa. Lebih lanjut Sanit (2015:157) mengatakan proses pelaksanaan pemilu berpengaruh langsung kepada pembentukan budaya politik, sebab tingkah laku para kontestan dan penyelenggara Pemilu langsung dihayati oleh anggota masyarakat yang mengetahuinya, baik pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, maupun melalui informasi. Selanjutnya sistem ini mengatur beberapa hal berikut ini yaitu jurus pencalonan kandidat, jurus pencoblosan suara, besar/bobot daerah pemilihan, lingkup daerah pemilihan dan jurus pengambilan keputusan.

Ditambahkan Rahman (2011:170) bahwa sistem pemilihan, walaupun terlihat hanya suatu mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintah selama beberapa tahun kemudian, namun sesungguhnya merupakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu dalam masyarakat yang luas, kompleks

dan modern, boleh jadi pemilu merupakan kunci untuk menentukan suatu sistem yang demokratis. Oleh karena itu pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam pembangunan politik Indonesia dimasa mendatang serta dalam menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan.

Untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 57 menyerahkan pelaksana pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut: (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 mengabulkan permohonan agar KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD sebab akan menimbulkan ketidak independenan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. KPUD bertanggungjawab kepada publik dan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Menurut Irtanto (2018:161), banyaknya kasus dalam pilkada, maka perlu adanya peningkatan kualitas pemilu dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Perhatikan iklim demokratisasi, harus dimulai dari partai politik (terutama) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam proses penjurangan, penyaringan dan penetapan calon kepala daerah. Partai politik harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutment calon kepala daerah yang demokratis
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat, benar-benar mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarkhi
3. Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan kontaminatif

4. Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun
5. Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan politik.

Berdasarkan di atas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme KPUD, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat dan independensi terhadap pemerintah. Sebagaimana sebuah proses pemilu dan pilkada merupakan bagian dari sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik Indonesia. Oleh karena itu pilkada memiliki manfaat yang penting menurut Mubarak dalam Irtanto (2018:161-162), menyebutkan ada beberapa manfaat pilkada sebagai berikut:

1. Kongkritisasi demokrasi, yaitu proses pilkada akan memenuhi kaidah proses demokratisasi pada dua level struktural dan kultural, level struktural lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin luas. Kaidah 50 plus satu adalah angka ril dan mutlak merupakan cerminan dan representasi suara rakyat dan level kultural proses pilkada ditengarai akan memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran
2. Ada kemungkinan kekerasan terhadap proses dan data terkurangi
3. Terkurangnya mekanisme politik uang.

Menambahkan manfaat positif yang telah disampaikan Mubarak, Afiti dalam Irtanto (2018:163), memberikan manfaat lainnya adalah lahirnya pemimpin yang mengenal konteks lokal dan bertanggungjawab kepada rakyat, dengan asumsi bahwa rakyat akan memilih orang yang mereka kenal dengan baik. Sementara itu Huda dalam Irtanto (2018:162) menambahkan dua keuntungan positif yaitu pilkada langsung memberi kesempatan yang luas untuk terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat dan stabilitas pemerintahan lebih terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa pilkada memiliki peranan yang strategis untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, sehingga akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat dibandingkan kepada partai politiknya. Oleh karena itu pentingnya pilkada diselenggarakan demi meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, adanya dua fokus tersebut membuat keterlibatan *local strongmen* sangat besar dalam pilkada. Hal itu dikarenakan *local strongmen* dipandang sebagai investor politik pilkada yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses desentralisasi yang sejati di level lokal.

2.4 Kerangka Pikir

Pilkada serentak melahirkan banyak catatan penting yang menarik untuk dikaji sebab pilkada serentak ini merupakan rentetan perjalanan politik Indonesia yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan menentukan kepala daerah mereka secara langsung. Jika dilihat dari perspektif sejarah setelah krisis moneter dan politik pada tahun 1997 dan 1998, yang diikuti dengan periode yang diberi label “reformasi”, banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki suatu fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis ketika masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih menonjol. Terlebih lagi, transisi itu diiringi dengan proses desentralisasi, yang membuahkan otonomi kedaerahan dan demokrasi, selain itu membuat tata pemerintahan menjadi lebih transparan, (Nordholt, 2017:1).

Dampak dari desentralisasi adalah membuat berbagai daerah berlomba-lomba untuk melakukan pemekaran yang membuat gairah politik lokal menjadi tumbuh, dan memunculkan berbagai kontestasi lokal yang menarik dan memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk menjadi dan menentukan pilihan pemimpin daerahnya baik itu pada skala Desa, Kabupaten atau Kota maupun Gubernur. Adanya kontestasi politik yang melibatkan berbagai aktor politik akan memunculkan pemimpin baru dalam wilayah tersebut yang

dipilih berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu hal yang terdapat pada dinamika politik lokal, yang menjadi isu sentral adalah munculnya elit-elit lokal, posisi elit lokal dalam kaitannya dengan budaya politik adalah sebagai agen budaya yang merupakan penerus nilai-nilai budaya politik yang tumbuh dan berkembang diarah lokal, selain itu juga merupakan produsen budaya. Dengan kata lain perannya sangat penting untuk keberhasilan demokrasi karena tingkah laku dan kebijakannya memiliki arti penting dan pengaruh dalam konsolidasi demokrasi.

Fenomena politik lokal terdapat keterlibatan banyak elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Elit politik dalam konteks lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Sedangkan elit non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang memiliki pengaruh di mata masyarakat, (Nurhasim, 2013:13).

Pada sisi inilah terdapat elit lokal yang sebenarnya dapat berkamufase dan memiliki kedua unsur-unsur, baik sebagai elit politik lokal dan sebagai elit non politik lokal yang disebut *local strongmen*. *Local strongmen* dalam eksistensinya selalu diidentikkan dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta menimbulkan pengaruh tersendiri pada bidangnya.

Local strongmen merupakan aktor di tingkat lokal yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam kehidupan sosial di masyarakat, masing-masing *local strongmen* memiliki entitas sendiri-sendiri dalam kekuasaan sosialnya. Mereka menjelma menjadi sebuah kekuatan politik yang pertumbuhannya

pesat sampai saat ini. Kekuatan politik ini selalu orientasi bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu untuk melihat *local strongmen* dalam aktivitas kontestasi politik lokal Menurut Bourdieu (2018:126-136) dapat dilihat dari 4 (empat) modal dan menurut Marijan (2016:89) terdapat 3 (tiga) modal, diantara keduanya memiliki 2 (dua) modal yang sama yaitu modal ekonomi dan modal sosial, maka dari itu dalam menganalisis peran *local strongmen* dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) jenis modal antara lain:

1. Kapital ekonomi

Modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain. Jika dikaitkan dengan aktivitas Pilkada modal ekonomi yang terlihat adalah uang, modal uang digunakan untuk membiayai kampanye.

Masing-masing partai/politisi berusaha untuk meyakinkan publik bahwa partai/politisi tersebut adalah partai/politisi yang lebih peduli, empati, memahami benar persoalan bangsa dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Salurannya adalah melalui media promosi, seperti TV, lobi ke ormas, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik dan pengumpulan massa, semuanya itu membutuhkan dana yang besar.

2. Kapital budaya/kultural

Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan akan nilai-nilai (*values*) mengenai segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya untuk mengaktualisasikannya. Modal kultural tidak dengan sendirinya teraktualisasikan dalam realita yang bermanfaat bagi orang yang meyakiniinya, dan atau masyarakat pada umumnya. Mirip dengan kemanfaatan modal sosial, modal kultural dapat berhenti sebagai mutiara terpendam yang tidak memberikan manfaat apapun. Kemampuan dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk memelihara, melestarikan, memperbaharui, dan memanfaatkannya.

3. Kapital simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, satus tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik disini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun diatas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi.

4. Kapital sosial

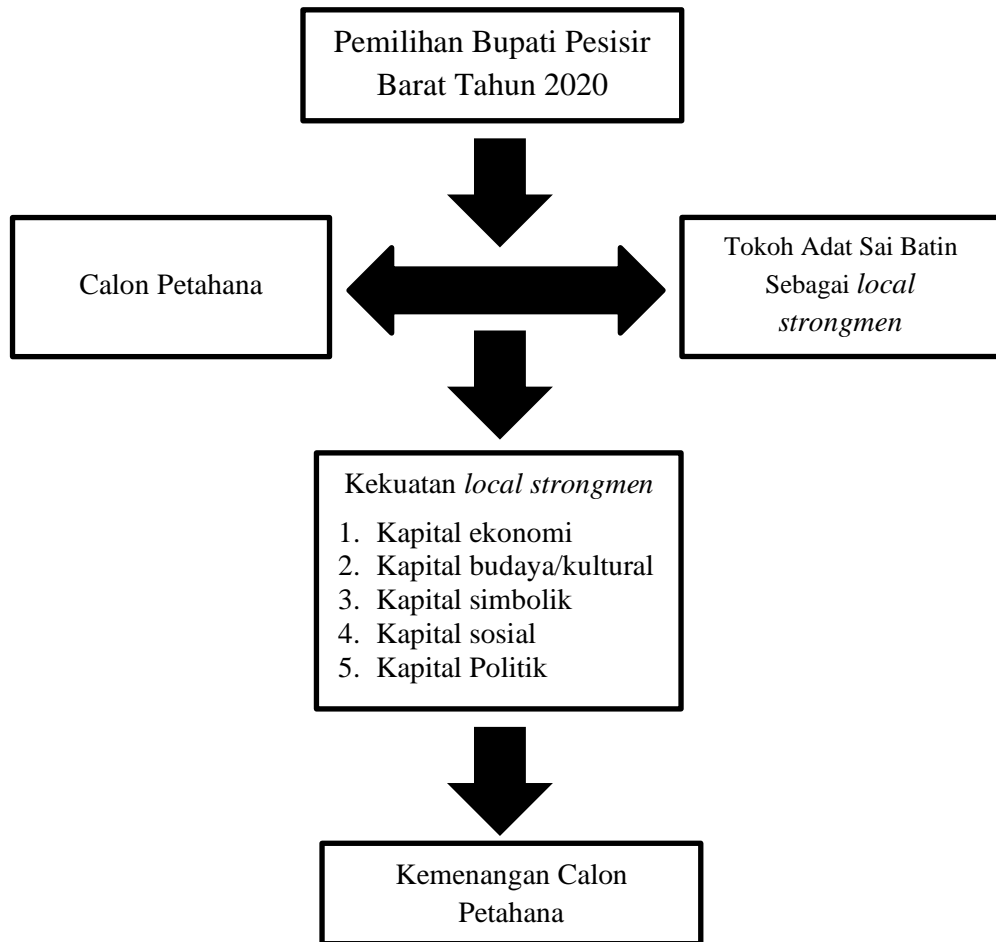
Modal sosial atau *social capital* merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya yang digunakan untuk investasi, disebut dengan modal. Modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial disini tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang. Misalnya pada kelompok institusi keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat mengarah pada kerjasama. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Modal sosial diukur dalam tiga cara yaitu, pengukuran pertama dengan cara melihat dukungan kelompok kolektif calon diukur dengan jumlah dukungan kandidat lain menerima. Pengukuran ini juga akan menyertakan dukungan dari individu, dengan asumsi bahwa dukungan individu membawa pada dukungan kolektif, bukan hanya mewakili individu memberikan dukungan tersebut. Pengukuran kedua menunjukkan ikatan pribadi calon kelompok-kelompok dimana kandidat langsung berpartisipasi diluar partai politik. Kelompok tersebut misalnya, akan kelompok-kelompok sipil lokal, keanggotaan gereja, asosiasi profesional, dan klub. Pengukuran ketiga dari modal sosial adalah pengakuan nama. Pengukuran ini menunjukkan seberapa dikenal calon dalam asosiasi-nya.

5. Kapital Politik

Modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat peneliti gambarkan dalam bentuk kerangka pikir seperti dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara empiris data-data sesuai dengan kenyataan yang riil dan faktual yang kemudian dinarasikan berbentuk kalimat-kalimat baku. Data-data tersebut berasal dari pernyataan, laporan, narasi dan bentuk-bentuk data lainnya yang sifatnya non-angka atau kuantitatif, (Moleong, 2011:6).

Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan penelitian ini karena mampu menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Selain itu, pada tipe penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk mengkomparasikan data satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh narasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan tentang *local strongmen* pemenangan petahana pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, hal itu dengan pertimbangan kuatnya *local strongmen* yaitu tokoh adat Sai Batin yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) yang mendukung calon petahanan Agus Istiqlal. Penelitian ini sangat perlu dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat karena Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten otonomi baru yang masyarakatnya masih memerlukan pendidikan politik secara menyeluruh karena selama ini masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat rata-rata mau menyalurkan suaranya atau memilih jika ada intruksi dari keluarga ataupun tokoh tertentu

dengan kata lain masih kuatnya budaya patroonisme, bukan didasarkan pada kesadaran dirinya sendiri sebaga warga negara Indonesia.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di 16 marga Sai Batin yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Penulis memilih Kabupaten Pesisir Barat karena daerah ini sangat kental dengan adat istiadat dan masih menganggap tokoh adat Sai Batin merupakan tokoh yang sangat dihormati, disegani, dan menjadi percontohan masyarakat. Selain itu, calon Petahana yang berkoalisi dengan salah satu Tokoh Adat Sai Batin dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data.

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, (Moleong, 2011:112). Cara pengambilan data primer melalui wawancara, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data, yaitu Agus Cik sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Agus Istiqlal - A Zulqoini Syarif, A. Zulqoini Syarif sebagai Wakil Bupati Pesisir Barat, Putrawan Jayaningrat sebagai Ketua MPAL Pesisir Barat, A. E Wardhana Kusuma sebagai Ketua Tim Pemenangan Aria Lukita Budiwan, - Erlina, Erwin Goeltom sebagai Ketua Tim Pemenangan Pieter – Fakhurrazzi, Darmawan Purba sebagai pengamat politik/akademisi Fisip Universitas Lampung, Andoyo sebagai pengamat politik/akademisi, Abdul Kodrat sebagai Komisioner Bawaslu Pesisir Barat, Khoirus Sobri sebagai Ketua Ormas Pemuda Anshor Pesisir Barat, Mawardi sebagai Ketua Lembaga Anti Narkotika Pesisir Barat dan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara yang penulis lakukan

dengan teknik wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur dengan cara menggunakan panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu menjawab permasalahan peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang merupakan data sekunder guna mendukung dan memperkuat data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, (Moleong, 2011:112). Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data profil Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Daftar Riwayat calon Petahana, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2020, data perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada Pilkada serentak 2020, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada Pilkada serentak 2020.

3.5 Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

Nama	Identitas	Alasan Pemilih Informan
Agus Cik	Ketua Tim Pemenangan Pasangan Agus Istiqlal - A Zulqoini Syarif	Informan bertanggung jawab atas kemenangan dari pasangan Pasangan Agus Istiqlal - A Zulqoini Syarif
A. Zulqoini Syarif	Wakil Bupati	Informan berasal dari masyarakat adat Sai Batin Informan mengetahui banyak hal terkait dengan dinamika politik baik pada waktu sebelum dan sesudah Pilkada dan informan mempresentasikan masyarakat lokal atau masyarakat adat Sai Batin
Putrawan Jayaningrat	Ketua MPAL Pesisir Barat	Informan merupakan penanggung jawab atas kemenangan Pasangan Aria Lukita Budiwan, - Erlina

Erwin Goeltom	Ketua Tim Pemenangan Pieter – Fakhrurazzi	Informan merupakan penanggung jawab atas kemenangan Pasangan Pieter – Fakhrurazzi
Darmawan Purba	Pengamat Politik/Akademisi Fisip Universitas Lampung	Informan memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai dinamika politik etnis di Kabupaten Pesisir Barat
Andoyo	Pengamat Politik/Akademisi	Informan memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai budaya politik etnis di Kabupaten Pesisir Barat
Abdul Kodrat	Komisioner Bawaslu Pesisir Barat	Informan memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan pada saat Pilkada Kabupaten Pesisir Barat
Khoirus Sobri	Ormas Pemuda Anshor Pesisir Barat	Informan memiliki kemampuan untuk mengawal roda pemerintahan termasuk dalam pelaksanaan Pilkada
Mawardi	Ketua Lembaga Anti Narkotika Pesisir Barat	Informan memiliki kemampuan untuk mengawal roda pemerintahan termasuk dalam pelaksanaan Pilkada
1. Budiman 2. Medi Panca Wijaya 3. Ade Saputra 4. Ardian Nur 5. Agus Andika Putra	Masyarakat yang memilih petahana	Informan merupakan masyarakat Pesisir Barat yang merasakan program dari Agus Istiqlal selaku calon petahana dan memiliki hak suara dalam Pilkada Pesisir Barat 2020 lalu

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan maksud tertentu, dengan cara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014: 186). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan pemanfaatan kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik dan kapital sosial serta untuk mendapatkan data dan informasi seperti dinamika politik etnis pada Pilkada Pesisir Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peneliti (Usman dan Akbar, 2014: 69). Dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data seperti profil Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Daftar Riwayat calon Petahana, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2020, data perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada Pilkada serentak 2020, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada Pilkada serentak 2020.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan merujuk pada Miles and Huberman yang terdiri dari tiga cara atau tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun cara analisis data dalam kerangka kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses yang merujuk pada proses pemilihan dan penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis yang berupa dokumen, laporan ataupun materi-materi empiris lainnya tentang *local strongmen* kemenangan petahana pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

2. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data merupakan tahapan setelah kondensasi data. Dalam tahapan ini data yang telah terkondensasi kemudian diaktualisasikan berupa catatan dan narasi, tabel, grafik, diagram ataupun bagan untuk menjelaskan kerangka penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan eksplorasi dengan memberikan pandangan dari data-data yang diperoleh untuk melihat pola dan keterkaitan secara sistematis tentang *local strongmen* kemenangan Petahana pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir bagi peneliti untuk memaparkan hasil dari temuan yang sudah diteliti serta mendeskripsikan obyek yang sebelumnya dianggap masih bias. Dalam pengambilan keputusan, peneliti memberikan hasil dari paparan yang sudah dijabarkan untuk menjawab tujuan penelitian tentang *local strongmen* pemenangan petahana pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, (Mathew dan Huberman, 2014:121).

3.8 Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Derajat kepercayaan yang fungsinya untuk melaksanakan penyelidikan, sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, derajat kepercayaan dapat dicapai lewat ketekunan pengamatan, perpanjangan partisipasi, melakukan triangulasi, memperbanyak referensi dan mengkaji kasus negatif
2. Keteralihan merupakan validitas eksternal didasarkan pada konteks empiris setting penelitian, yaitu tentang yang diterima peneliti dan yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima
3. Kepastian yaitu objektivitas yang berdasarkan pada tradisi penelitian kualitatif, derajat ini juga dapat dicapai melalui pemeriksaan (*audit*) yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian, (Moleong, 2011:182).

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Putrawan Jayaningrat yang merupakan Ketua Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) Pesisir Barat yang juga sebagai *local strongmen* mampu memanfaatkan kapital-kapital yang dimiliki diantaranya kapital budaya/kultural, sosial, simbolik dan politik yang dimiliki untuk memenangkan pasangan Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif dalam Pilkada Pesisir Barat tahun 2020, sementara itu dilihat dari modal kapital ekonomi kurang memiliki peran karena terbatasnya sumberdaya. Selanjutnya, status Putrawan Jayaningrat sebagai seorang birokrat/Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikannya harus memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu dimana seorang ASN di larang terlibat langsung untuk berkampanye dan memobilisasi rakyat untuk mendukung calon kepala daerah. Walaupun demikian Putrawan Jayaningrat tetap mampu mengkonversikan kapital-kapital yang dimilikinya tanpa harus terlihat langsung, seperti:

1. Peran Putrawan Jayaningrat dalam pemanfaatan kapital ekonomi tidak dapat dianalisis lebih jauh karena tidak adanya sumbangan dana yang diberikan kepada petahana, namun Putrawan Jayaningrat memiliki peran membantu petahana untuk menjalin komunikasi dengan pengusaha lokal untuk menjadi donatur. Adapun dana yang digunakan dalam kemenangan mayoritas bersumber dari dana pribadi pasangan petahana.
2. Peran Putrawan Jayaningrat dalam pemanfaatan kapital budaya/kultural ditunjukkan dengan kemampuannya memanfaatkan statusnya sebagai ketua adat sai batin yang sangat dihormati dan dekat dengan masyarakat

sehingga mampu menjalin komunikasi yang ditunjukkan melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat memilih Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif pada pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dan juga sebagai representasi adat dan masyarakat kru. Faktor lain yaitu tingginya popularitas Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif sebagai pasangan petahana, hal tersebut dikarenakan *track record* Agus Istiqlal yang baik. Agus Istiqlal merupakan calon petahana dan pensiunan Jaksa dan A. Zulqoini Syarif seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman sehingga dianggap sebagai pasangan yang ideal karena sama-sama memiliki pengalaman dalam lembaga pemerintahan.

3. Peran Putrawan Jayaningrat dalam pemanfaatan kapital simbolik ditunjukkan dengan kemampuannya memanfaatkan simbol yang dimiliki yaitu sebagai seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi dimasyarakat sebagai tokoh adat dan juga Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kharisma, dihormati masyarakat dan relasi yang luas. Sehingga mampu menghimpun dukungan serta mendorong ketokohan A. Zulqoini Syarif sebagai representasi 16 marga Sai Batin. Selain itu, ketokohan Agus Istiqlal sebagai calon petahana juga mempunyai pengaruh yang baik di masyarakat, hal tersebut disebabkan dengan *track record* yang dinilai baik di periode sebelumnya menjabat sebagai bupati.
4. Peran Putrawan Jayaningrat dalam pemanfaatan kapital sosial ditunjukkan dengan kemampuannya memanfaatkan kedekatannya dengan masyarakat, Putrawan Jayaningrat kerap hadir dalam acara-acara seperti gotong royong, musyawarah-musyawah ataupun acara yang sifatnya pribadi seperti hajatan, dan membantu secara moril dan materil masyarakat sekitar yang sedang berduka karena sakit, terkena musibah, atau meninggal dunia. Hubungan tersebut mampu dikonversikan kedalam bentuk dukungan kepada calon petahana untuk memenangkan pemilihan bupati pesisir barat tahun 2020. Selanjutnya, relasi tersebut mampu dimanfaatkan untuk mendorong elektabilitas petahana, kelayaitasan masyarakat pendukung, dan pengaruh Putrawan Jayaningrat sebagai ketua adat, menjadikan

pasangan petahana memenangkan Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

5. Peran Putrawan Jayaningrat dalam pemanfaatan kapital politik ditunjukkan dengan prestasi Putrawan Jayaningrat sebagai sosok birokrat yang ikut serta dalam menjaga nilai-nilai adat Sai Batin di Kabupaten Pesisir Barat. Putrawan Jayaningrat merupakan tokoh adat yang memiliki hubungan dekat dengan para tokoh adat lainnya, ketua partai politik dan relasi dengan para pengusaha sehingga dengan adanya kekuatan politik tersebut memudahkan pasangan petahana untuk memenangkan Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

6.2 Saran

Eksistensi Putrawan Jayaningrat sebagai *local strongmen* ditandai dengan berhasilnya Putrawan Jayaningrat membentuk jaringan, berupa jaringan keluarga, jaringan dengan masyarakat, jaringan dengan para pejabat birokrat, jaringan dengan para pengusaha sehingga terbentuk atas *patron-klien*. Putrawan Jayaningrat melakukan hubungan baik kapital ekonomi, kapital budaya/kultural, kapital simbolik dan kapital sosial. Dengan melekatnya keempat aspek tersebut maka semakin tepat bahwa Putrawan Jayaningrat adalah *local strongmen* yang berpengaruh besar terhadap kemenangannya Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif selaku calon petahana. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Untuk *local strongmen* hendaknya mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi yang sesuai dengan esensi demokrasi itu sendiri. Tokoh-tokoh adat yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Pesisir Barat sebagai *local strongmen* bisa saja memperoleh kuasa yang begitu besar namun harus di ketahui gerakan masyarakat sipil, LSM, dan sebagainya harus berperan untuk mengontrol kuasa tersebut agar tidak terjadi *abuse of power*. Isu yang harus dicermati oleh politisi, peneliti, pemerintah, legislatif adalah *local strongmen* ini meniscayakan terjadinya dinasti politik disebabkan melimpahnya kuasa yang dimiliki

2. Sinergisitas yang di bangun oleh *local strongmen* hendaknya berorientasi kepada memberikan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pilkada serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suara demi kelancaran system demokrasi yang ada
3. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada yang bertugas melakukan pengawasan hendaknya aktif memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada seluruh ASN yang ingin terlibat dalam pemilu maupun pilkada sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik terkait tentang netralitas dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2018. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Alfabeta.
- Agustino, Leo., dan Yusoff, Mohammad Agus. 2010. *Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21
- Aprilia, Resti, Saputri, Rini Archda., dan Febriani, Luna. 2021. *Strategi Orang Kuat Lokal Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka)*, Jurnal Studi Inovasi Vol. 1 No. 3
- Amrianto, Tito, 2018. *Fenomena Local Strongman (Studi Kasus Pengaruh Sukarmis dalam Mendukung Kemenangan Andi Putra sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi)*. jurnal MODERAT, 655-664.
- Asfar, Muhammad. 2016. *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Surabaya: Pushadam.
- Bourdieu, Pierre. 2018. *The Field on Cultural Production: Essays on Art and Literature Cambridge*. diterjemahkan oleh Nanang Krisdiyanto. Jurnal.KANAL.Vol. 2, No. 2,
- Fukuyama, Francis. 2020. *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gaffar, J. M. 2017. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Afan. 2021. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Halim, Abdul. 2014. *Politik Lokal Pola Aktor & Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung*, Yogyakarta: LP2B.
- Harris, John. 2017. *Politisasi Demokrasi*, Jakarta: Demos.
- Hutabarat, Melvin Perjuangan. 2021. *“Orang Kuat Lokal” di Indonesia Era Desentralisasi (Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi)*, Jurnal Penelitian Politik Vol.19 No.21
- Iman, Syarif. 2014. *Pemekaran Daerah, Pilkada dan Pergeseran Relasi Antar Elit. Dalam Abdul Malik Gismar dan Syarif Hidayat (editor), Reformasi Setengah Matang*. Bandung: Teraju.

- Irtanto. 2018. *Dinamika Politik Lokal: Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaldun, I. 2017. *Local Strongman Dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni Dan Muhammad Amin Jasa Pada Pilkada Kabupaten Mamuju Tengah 2015)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Mar'iyah, C. 2019. *Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia: Demokrasi Untuk Apa Dan Untuk Siapa?*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia.
- Marijan, Kacung, 2016, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya: Pustaka Eureka
- Matthew, B., Miles., dan Huberman, A., Michael. 2014. *Analisis data Kualitatif Terj. Tjejep Rohidi*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Ramadja Karya.
- Migdal, Joel S. 2009. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another* Cambridge, UK: The Press Syndicate of The University of Cambridge
- Minan, Khoirul. 2014. *Sinergi Local Strongmen: Pengusaha dan Tokoh Agama dalam pemilihan Legislatif Tahun 2014*, Jurnal Penelitian Politik Vol.18 No.2
- Nordholt, Henk Schulte. 2017. *Politik Lokal di Indonesia (Renegotiating Boundaries; Local Politics in post-Soeharto Indonesia)*, Terj. Bernard Hidayat, Jakarta: KITLV Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhasim, Moch. 2013. *Konflik Antara Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: P2P, LIPI.
- Prabawati, D. 2018. *Lombok Utara : Geliat Adat di Tengah Demokratisasi. Dalam L. Bayo, P. Santoso, & W. Samadhi, Rezim Lokal di Indonesia (Memaknai Ulang Demokrasi Kita)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rahman, Arifin. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penertbit SIC
- Sanit, Arbi. 2015. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sary, Fitriani. 2018. *Bangsawan dan Politik Lokal (Studi Kasus : Kontestasi Andi Pada Pilkada Kabupaten Pinrang*”, .Jurnal KANAL. Vol. 2, No.2

- Siregar, H. 2016. *Local Bosses Sebagai Mesin Pendulang Suara (Studi DPC Partai Derakan Indonesia Raya Sleman Dalam Pemilihan Legislatif 2014)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suaib, Eka dan Zu, La Husen. 2016. *Fenomena "Bosisme Local" di Era Desentralisasi : Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara*", *Jurnal Penelitian Politik* Vol.12 No.10
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhro, Siti. 2019. *Demokrasi Lokal; Peran Actor Dalam Demokratisasi*, Yogyakarta: Ombak.